

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dan industri perbankan secara keseluruhan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan, memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Secara mikro, bank berfungsi menyalurkan dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana kepada pelaku usaha dan perorangan yang membutuhkan dana dalam rangka memperlancar usaha dari pihak-pihak yang berkepentingan. Secara makro, industri perbankan berperan sebagai sumber pembiayaan bagi perkembangan perekonomian dan sebagai sarana dalam pelaksanaan kebijakan moneter (Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, 2012).

Lembaga perbankan Indonesia terdiri atas Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Sentral adalah bank yang mempunyai tugas sebagai Pengawas Perbankan. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang salah satu kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak boleh memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Darmawi, 2011:1).

Perkembangan industri perbankan Indonesia telah menunjukkan yang sangat pesat, baik dari sudut pertumbuhan aset, jenis produk yang ditawarkan antara lain yang sebagai akibat berkembangnya bank sebagai konglomerasi, maupun teknologi informasi yang digunakan. Perkembangan tersebut telah mengakibatkan persaingan antar bank

menjadi semakin ketat. Kondisi ini akan terus berlangsung, bahkan akan semakin meningkat dengan akan terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015 (Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, 2012).

Hal ini juga terlihat dengan bertambahnya jumlah bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2010 terdapat 29 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 31 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peningkatan jumlah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terjadi juga di tahun 2012, perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia bertambah menjadi 32 bank. Jika dilihat dari statistik Bank Indonesia, perkembangan aset bank umum juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Menurut Bank Indonesia, total aset bank umum tahun 2010 adalah 3.008.853.000.000.000. Pada tahun 2011 total aset bank umum mengalami peningkatan menjadi 3.652.832.000.000.000. Dan di tahun 2012 total aset bank umum mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 4.262.587.000.000.000 (www.bi.go.id). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sektor perbankan mengalami perkembangan yang baik.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak (www.bi.go.id). Bank Indonesia (BI) mengingatkan perbankan untuk tetap menjaga tata kelolanya dengan baik, bila tidak mau terkena sanksi divestasi sesuai dengan aturan Kepemilikan Saham Bank Umum (<http://www.infobanknews.com>).

Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*. Konsep ini menekankan pada dua hal yakni, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu,

transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders* (Kaihatu, 2006).

Penerapan *Good Corporate Governance* dapat memberikan kepercayaan kepada pemilik perusahaan terhadap kemampuan manajemen dalam mengelola kekayaan yang dimiliki oleh pemilik (pemegang saham), sehingga dapat meminimalisasi konflik kepentingan dan biaya keagenan (*agency cost*) (Susiana dan Herawaty, 2007 dalam Noviawan dan Septiani, 2013). Konflik kepentingan dan biaya keagenan berhubungan dengan teori keagenan, dimana teori tersebut menjelaskan bahwa terdapat pemisahan antara pemilik dengan manajer atau dapat dikatakan bahwa hubungan antara pemilik dengan manajer sulit terbangun karena adanya benturan kepentingan.

Dalam pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* pada tahun 2012 menjelaskan bahwa setiap bank harus memastikan asas *Good Corporate Governance* (GCG) diterapkan pada setiap aspek bisnis dan diseluruh jajaran bank. Asas *Good Corporate Governance* yang harus dipastikan pelaksanaannya meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Asas *Good Corporate Governance* diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) bank dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan (Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, 2012).

Menurut Wijayanti (2012) dalam Noviawan dan Septiani (2013) kinerja keuangan merupakan ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan dan hal ini sangat penting, baik bagi investor maupun bagi perusahaan yang bersangkutan. Pentingnya penilaian prestasi kinerja perusahaan dengan melakukan analisis suatu perusahaan di era modern dengan perkembangan teknologi yang pesat menjadi hal yang sangat kompleks. Semakin kompleks aktivitas pengelolaan perusahaan maka akan meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan berjalan dengan baik.

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran

dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Informasi kinerja perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi yang mungkin di kendalikan di masa depan. Informasi fluktuasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, disamping itu informasi tersebut juga dapat berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya (<http://www.referensimakalah.com>).

Kinerja keuangan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya secara optimal. Bagi lembaga keuangan bank, kinerja keuangan menunjukkan bagaimana orientasi manajemen dalam menjalankan organisasinya dan mengakomodasi kepentingan manajemen (pengurus), pemegang saham (pemilik), nasabah, otoritas moneter, maupun masyarakat umum yang aktivitasnya berhubungan dengan perbankan. Sehingga penting bagi bank untuk senantiasa menjaga kinerjanya dengan baik, terutama dalam menjaga dan mempertahankan tingkat profitabilitas yang tinggi dan prospek usaha yang selalu berkembang (Savitri, 2011).

Salah satu rasio profitabilitas dalam menganalisis laporan keuangan atas laporan kinerja keuangan perusahaan adalah *Return of Asset* (ROA). Rasio ROA lebih dipilih karena merupakan rasio profitabilitas perusahaan yang mengukur laba perusahaan yang dihasilkan dalam setiap pemanfaatan asetnya. Laba atau keuntungan bisnis merupakan tujuan utama suatu perusahaan beroperasi sehingga dengan diperolehnya laba yang besar telah dapat mencerminkan bahwa perusahaan telah mencapai kinerja yang baik. Hasil penelitian Ulum (2008) juga menunjukkan bahwa ROA merupakan indikator yang paling signifikan untuk menjelaskan variabel kinerja keuangan perusahaan (Ningrum dan Rahardjo, 2012).

Bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Peranan bank yang utama adalah memobilisasi dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi serta memberikan fasilitas pelayanan dalam lalu lintas pembayaran (Wijayanti, 2013). Untuk itu, penting bagi bank menerapkan *Good Corporate Governance* karena industri perbankan merupakan industri yang sarat dengan peraturan untuk menjaga kepercayaan nasabah dan kesinambungan usaha.

Penerapan *Good Corporate Governance* menjadi permasalahan yang penting dalam dunia perbankan. Semenjak krisis keuangan yang melanda Indonesia tahun 1997 telah menghancurkan berbagai sendi perekonomian salah satunya perbankan yang mengakibatkan krisis perbankan terparah dalam sejarah perbankan nasional yang menyebabkan penurunan kinerja perbankan nasional (Dewayanto, 2010).

Di era persaingan global ini, dimana batas-batas negara tidak lagi menjadi penghalang untuk berkompetisi, hanya perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* yang mampu memenangkan persaingan. *Good Corporate Governance* merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan *sustainable*. *Good Corporate Governance* diperlukan untuk menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat sehingga mampu menjadi perusahaan kelas dunia (<http://workshopprogram.blogspot.com>).

Ketika penerapan *Corporate Governance* lemah maka akan menjadi pemicu terjadinya berbagai skandal keuangan didalam perusahaan. Salah satu contohnya terjadi pada Bank Century yang mengalami kerugian sebesar Rp 7.281.150.000.000 (www.bpk.go.id). Pada tahun 2008, Bank Century diketahui hanya memiliki satu Komisaris Independen padahal dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, jumlah Komisaris Independen paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Kurangnya jumlah Komisaris Independen ini mengakibatkan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan kurang berjalan dengan efektif. Sehingga membuka peluang untuk Komisaris dan Direksi untuk melakukan penyalahgunaan wewenang. Seperti yang terjadi pada kasus ini dimana mantan Direktur Utama dan Komisaris Utama yang juga Pemegang Saham telah menggelapkan dana investasi nasabah. Robert

Tantular memiliki kewenangan penuh sebagai Komisaris sehingga ia mempunyai kendali penuh untuk menekan dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus ini Robert Tantular telah mempengaruhi pejabat bank untuk tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (www.tempo.co).

Hal ini juga terjadi pada Citibank tahun 2011, dalam kasus tersebut dana nasabah yang bernilai Rp 40.000.000.000 dibobol oleh pegawai dari Citibank. (www.okezone.com). Bareskrim Polri telah menetapkan petinggi Citibank cabang Landmark Jakarta sebagai tersangka pada kasus pembobolan dan pencucian uang (*money laundring*) dana nasabah Citibank yang melibatkan *Relationship Manager* Citibank, *Citigold Executive Head*, *Cash Official Manager* atau atasan *teller* dan *Cash Supervisor Manager* (www.tribunnews.com). Jaksa penuntut umum mendakwa Malinda Dee selaku *Relationship Manager* Citibank atas dugaan pembobolan dan pencucian dana Citibank sekitar Rp 40.000.000.000. Malinda Dee telah mengaburkan transaksi dan pencatatan tidak benar terhadap slip transfer penarikan dana pada beberapa rekening nasabahnya. Menurut Dewan Gubernur Bank Indonesia, hal ini terjadi disebabkan ada tiga prosedur yang tidak dilakukan oleh Citibank. Pertama, tidak ada supervisi oleh atasan terhadap Malinda Dee. Kedua, ada dugaan penyalahgunaan blanko yang seharusnya tidak boleh ditandatangani dahulu oleh nasabah. Dan ketiga, adanya penyetoran uang yang dilakukan nasabah melalui Malinda. Tindakan tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan, karena untuk penyetoran dana nasabah harus datang langsung ke teller (<http://focus.news.viva.co.id>). Di kasus Citibank ini yang menjadi poin utamanya adalah pengendalian standar operasional perusahaan yang kurang ketat (www.ekonomi.kompasiana.com). Pengendalian internal tidak berjalan secara efektif di Citibank karena tidak adanya Komisaris Independen yang bertugas untuk melakukan pengawasan kegiatan Citibank secara independen dan seluruh saham yang dimiliki oleh Citibank merupakan milik Institusi. Sehingga, manajemen cenderung melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yaitu dengan melanggar kontrak dan melanggar kode etik perusahaan.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran kepada nasabah, kepercayaan nasabah sedikit pudar dengan mulai bertanya-tanya atas keamanan dana mereka di sebuah bank (<http://finance.detik.com>). Terjadinya berbagai kasus perbankan di Indonesia membuat banyak pihak yang mulai berpikir bahwa penerapan *Good Corporate Governance* menjadi suatu kebutuhan di dunia bisnis sebagai barometer akuntabilitas dari suatu perusahaan (Dewayanto, 2010).

Penerapan *Good Corporate Governance* ini dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat (Dewayanto, 2010).

Good Corporate Governance lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan *stakeholders*, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar analisis dalam mengkaji *Good Corporate Governance* di suatu negara dengan memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan yang sistematis yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja perusahaan dan bagaimana korelasi antar kebijakan tentang buruh dan kinerja perusahaan (Asba, 2009).

Selain itu penerapan *Good Corporate Governance* di dalam perbankan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri. Perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* akan lebih efisien dan daya saingnya meningkat (Dewayanto, 2010).

Good Corporate Governance terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan (Reksodiputro, 2004 dalam Sudana dan Arlindania, 2011). Dalam penelitian ini mekanisme *Good Corporate Governance* diprosikan dengan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komposisi Dewan Komisaris Independen.

Kepemilikan Manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen, yaitu direksi dan komisaris (Lembaga Komisaris, dan Direktorat Indonesia, 2010). Dengan adanya kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan maka dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya, sehingga permasalahan antara agent dan principal diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga masuk sebagai pemegang saham perusahaan (Jansen dan Meckling, 1976 dalam Ningrum dan Rahardjo, 2012).

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk lembaga atau institusi seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan luar negeri, pemerintah dan kepemilikan institusi lain (Rajgopal *et al.*, 1999 dalam Syami, 2012). Cornet (2006) dalam Ningrum dan Rahardjo (2012) menyatakan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh investor institusional akan mendorong manajemen untuk lebih berfokus pada kinerja perusahaan sehingga mengurangi perilaku *opportunistic*.

Dewan Komisaris Independen yang dimiliki oleh perusahaan di Indonesia diharapkan dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Keberadaan dewan komisaris independen dapat memberikan kendali dan monitoring bagi manajemen dalam operasional perusahaan, termasuk dalam pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial (Nurkhin, 2010).

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komposisi dewan komisaris kinerja keuangan masih ditemukan *research gap* atau inkonsistensi pada hasil penelitiannya.

Noviawan dan Septiani (2013) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa indikator *Good Corporate Governance* sebagai variabel independen yaitu, Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningrum dan Rahardjo (2012) serta Wiranata dan Nugrahanti (2013) menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA).

Penelitian yang dilakukan oleh Noviawan dan Septiani (2013) menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

keuangan (ROA). Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Mutmainah (2012) serta Wiranata dan Nugrahanti (2013) menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA).

Sudah dilakukan penelitian oleh Noviawan dan Septiani (2013) yang menyimpulkan bahwa Komposisi Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Mutmainah (2012) menunjukkan bahwa Komposisi Dewan Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012)”**

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme *Good Corporate Governance* (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komposisi Dewan Komisaris Independen) serta kinerja keuangan (ROA) pada perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012?
2. Apakah terdapat pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komposisi Dewan Komisaris Independen) secara simultan terhadap kinerja keuangan (ROA) pada perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012?
3. Apakah terdapat pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komposisi Dewan Komisaris Independen) secara parsial terhadap kinerja keuangan (ROA) yaitu:
 - a. Apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Manajerial secara parsial terhadap kinerja keuangan (ROA) pada perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012?

- b. Apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional secara parsial terhadap kinerja keuangan (ROA) pada perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012?
- c. Apakah terdapat pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen secara parsial terhadap kinerja keuangan (ROA) pada perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dibuat maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui mekanisme *Good Corporate Governance* (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komposisi Dewan Komisaris Independen) dan kinerja keuangan (ROA) pada perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012.
2. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan mekanisme *Good Corporate Governance* (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komposisi Dewan Komisaris Independen) terhadap kinerja keuangan (ROA) pada perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012.
3. Untuk menganalisis pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komposisi Dewan Komisaris Independen) terhadap kinerja keuangan (ROA) secara parsial:
 - a. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap kinerja keuangan (ROA).
 - b. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan (ROA).
 - c. Untuk menganalisis pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan (ROA).

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai mekanisme *Good Corporate Governance* dan kinerja keuangan dengan proksi *Return On Assets* yang didapatkan selama masa kuliah serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti sebagai dasar pemikiran atau bahan studi perbandingan dan merupakan media referensi untuk penelitian sejenis mengenai *Good Corporate Governance* dan kinerja keuangan dengan proksi *Return On Assets* pada perusahaan perbankan.

1.5.2 Aspek Praktis

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak perusahaan serta menjelaskan mengenai praktik *Good Corporate Governance* dan kinerja keuangan, sehingga dapat meningkatkan penerapan praktik *Good Corporate Governance* dan kinerja keuangan (ROA).
2. Bagi investor diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai praktik *Good Corporate Governance* dan kinerja keuangan (ROA) yang terjadi pada perusahaan perbankan agar dapat membantu dalam pengambilan keputusan manajemen atas investasinya.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini menguraikan landasan teori yang akan digunakan sebagai acuan dasar bagi penelitian khususnya mengenai mekanisme *Good Corporate Governanced* dan kinerja keuangan (ROA). Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel) dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil dari analisis penelitian, serta pengujian dan analisis hipotesis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.